



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

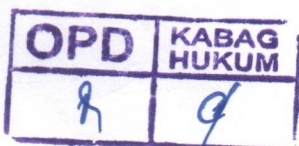
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :


1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

OPD	KABAG HUKUM
8	e/



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

OPD	KABAG HUKUM
	

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

OPD	KABAG HUKUM
8	9

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

OPD	KABAG HUKUM
	

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Semula berjumlah Rp. 1.147.457.240.969,03 berkurang Rp. 103.119.978.142,52 sehingga menjadi Rp. 1.044.337.262.826,51 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp 1.121.507.601.470,03	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp (108.422.335.551,24)</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 1.013.085.265.918,79



b. Belanja			
1. Semula	Rp	1.147.457.240.969,03	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	(103.119.978.142,52)	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp 1.044.337.262.826,51
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			Rp (31.251.996.907,72)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	26.949.639.499,00	
b) Bertambah / (Berkurang)	Rp	8.302.357.408,72	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 35.251.996.907,72
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
b) Bertambah / (Berkurang)	Rp	3.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp 4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp 31.251.996.907,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	65.728.304.508,13	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	42.999.171,61	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp 65.771.303.679,74

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp	811.938.611.059,90	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(101.819.184.943,90)	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp 710.119.426.116,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp	243.840.685.902,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(6.646.149.778,95)	
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp 237.194.536.123,05

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Pajak daerah

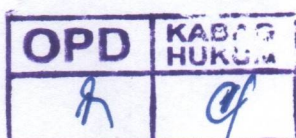
1. Semula	Rp	11.555.032.178,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(570.994.692,00)	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan			Rp 10.984.037.486,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp	4.350.705.973,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	404.132.274,00	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp 4.754.838.247,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	4.431.364.507,13	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	326.603.906,34	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 4.757.968.413,47



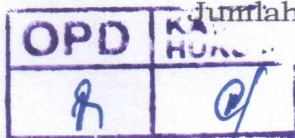
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1. Semula	Rp	45.391.201.850,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(116.742.316,73)</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp		45.274.459.533,27
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis			
a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak			
1. Semula	Rp	19.683.334.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>254.735.241,00</u>	
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan	Rp		19.938.069.241,00
b. Dana alokasi umum			
1. Semula	Rp	557.660.829.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(57.047.491.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp		500.613.338.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1. Semula	Rp	234.594.448.059,90	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(45.026.429.184,90)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp		189.568.018.875,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri			
a. Hibah			
1. Semula	Rp	40.902.044.900,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>11.524.283.000,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp		52.426.327.900,00
b. Dana darurat			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan	Rp		-
c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi			
1. Semula	Rp	75.506.856.002,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(16.754.715.778,95)</u>	
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp		58.752.140.223,05
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah			
1. Semula	Rp	127.431.785.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(1.415.717.000,00)</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp		126.016.068.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp		-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja tidak langsung			
1. Semula	Rp	603.957.494.408,68	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>14.872.759.432,08</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp		618.830.253.840,76



b. Belanja langsung		
1. Semula	Rp	543.499.746.560,35
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(117.992.737.574,60)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp	425.507.008.985,75
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp	389.784.516.085,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.233.796.234,21</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	391.018.312.319,21
b. Belanja bunga sejumlah		
1. Semula	Rp	-
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp	-
c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp	-
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	-
d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp	17.035.908.400,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(1.616.040.500,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	15.419.867.900,00
e. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp	250.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	250.000.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp	1.590.573.900,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(16.686.200,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	1.573.887.700,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp	192.928.581.683,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(9.413.065.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp	183.515.516.683,00
h. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp	2.367.914.340,68
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>24.684.754.897,87</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	27.052.669.238,55
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp	63.024.388.154,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>5.141.954.909,30</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	68.166.343.063,30
b. Belanja Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	268.954.472.332,20
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(57.582.939.872,35)</u>
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	211.371.532.459,85
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp	211.520.886.074,15
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(65.551.752.611,55)</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	145.969.133.462,60



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp 26.949.639.499,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 8.302.357.408,72</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp 35.251.996.907,72

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp 1.000.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp 4.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1. Semula	Rp 26.949.639.499,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 8.302.357.408,72</u>	
Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan		Rp 35.251.996.907,72

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1. Semula	Rp 1.000.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan		Rp 4.000.000.000,00



c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp	-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan		Rp	-

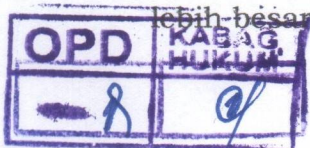
Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melelalui belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 06/1051/LB/2020

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeln	
6	INSPEKTORAT	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	3		
1						
1	PENDAPATAN DAERAH	1.121.507.601.470,03	1.013.085.265.918,79		(108.422.335.551,24)	(9,67)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.728.304.508,13	65.771.303.679,74		42.999.171,61	0,07
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	11.555.032.178,00	10.984.037.486,00		(570.994.692,00)	(4,94)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.350.705.973,00	4.754.838.247,00		404.132.274,00	9,29
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.431.364.507,13	4.757.968.413,47		326.603.906,34	7,37
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.391.201.850,00	45.274.459.533,27		(116.742.316,73)	(0,26)
1.2	DANA PERIMBANGAN	811.938.611.059,90	710.119.426.116,00		(101.819.184.943,90)	(12,54)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.683.334.000,00	19.938.069.241,00		254.735.241,00	1,29
1.2.2	Dana Alokasi Umum	557.660.829.000,00	500.613.338.000,00		(57.047.491.000,00)	(10,23)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	234.594.448.059,90	189.568.018.875,00		(45.026.429.184,90)	(19,19)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	243.840.685.902,00	237.194.536.123,05		(6.646.149.778,95)	(2,73)
1.3.1	Pendapatan Hibah	40.902.044.900,00	52.426.327.900,00		11.524.283.000,00	28,18
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.506.856.002,00	58.752.140.223,05		(16.754.715.778,95)	(22,19)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127.431.785.000,00	126.016.068.000,00		(1.415.717.000,00)	(1,11)
2	BELANJA DAERAH	1.147.457.240.969,03	1.044.337.262.826,51		(103.119.978.142,52)	(8,99)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	603.957.494.408,68	618.830.253.840,76		14.872.759.432,08	2,46
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	389.784.516.085,00	391.018.312.319,21		1.233.796.234,21	0,32
2.1.4	BELANJA HIBAH	17.035.908.400,00	15.419.867.900,00		(1.616.040.500,00)	(9,49)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	250.000.000,00	250.000.000,00		0,00	0,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.590.573.900,00	1.573.887.700,00		(16.686.200,00)	(1,05)
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	192.928.581.683,00	183.515.516.683,00		(9.413.065.000,00)	(4,88)
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.367.914.340,68	27.052.669.238,55		24.684.754.897,87	1.042,47

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1		3	4	5	6
2.2	BELANDA LANGSUNG	543.499.746.560,35	425.507.008.985,75	(117.992.737.574,60)	(21,71)
2.2.1	BELANDA PEGAWAI	63.024.388.154,00	68.166.343.063,30	5.141.954.909,30	8,16
2.2.2	BELANDA BARANG DAN JASA	268.954.472.332,20	211.371.532.459,85	(57.582.939.872,35)	(21,41)
2.2.3	BELANDA MODAL	211.520.886.074,15	145.969.133.462,60	(65.551.752.611,55)	(30,99)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.949.639.499,00)	(31.251.996.907,72)	(5.302.357.408,72)	20,43
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	26.949.639.499,00	35.251.996.907,72	8.302.357.408,72	30,81
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya Sebelumnya	26.949.639.499,00	35.251.996.907,72	8.302.357.408,72	30,81
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	300,00
3.2.2	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	300,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.949.639.499,00	31.251.996.907,72	5.302.357.408,72	20,43
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	380,00

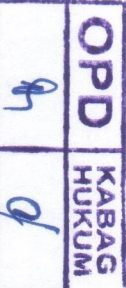
PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	PARAF	
1	SETDAKAB		
2	ASISTEN I		
3	ASISTEN II		
4	BPKD		
5	Kapolda		
6	Inspektoral		
7	6 Pembantu Urus		
8			
9			
10	KABAG HUKUM		

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2020

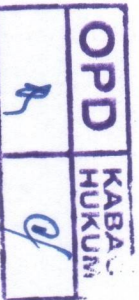
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						BELANJA								
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
1	Ususan Wajib Pelayanan Dasar															
1.01	Pendidikan	43.311.085.093,00	(1,36)	42.719.891.771,00	(1,36)	262.775.740.600,00	370.002.131.948,10	632.777.872.548,10	261.484.254.219,00	297.504.036.697,25	538.988.209.916,25	(73.789.581.631,85)	(11,66)			
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98.760.000,00	(5,16)	93.660.000,00	(5,16)	201.292.913.200,00	86.077.570.000,00	287.370.483.200,00	203.096.837.124,00	83.987.458.750,00	287.084.256.874,00	(286.187.236,00)	(0,10)			
1.01.1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98.760.000,00	(5,16)	93.660.000,00	(5,16)	201.292.913.200,00	86.077.570.000,00	287.370.483.200,00	203.096.837.124,00	83.987.458.750,00	287.084.256.874,00	(286.187.236,00)	(0,10)			
1.02	Kesehatan	43.099.285.093,00	(1,36)	42.513.191.771,00	(1,36)	47.115.003.100,00	125.227.577.750,99	172.342.580.850,99	43.340.901.888,00	130.650.555.972,25	174.000.457.860,25	1.657.877.009,26	0,96			
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	15.839.870.893,00	2,97	16.309.751.557,00	2,97	35.727.152.500,00	76.349.181.556,99	112.076.334.056,99	32.677.775.783,00	79.393.222.772,25	112.065.998.555,25	(10.335.501,74)	(0,01)			
1.02.1.02.01.01	Dinas Kesehatan	15.839.870.893,00	2,97	16.309.751.557,00	2,97	35.727.152.500,00	76.349.181.556,99	112.076.334.056,99	32.677.775.783,00	79.393.222.772,25	112.065.998.555,25	(10.335.501,74)	(0,01)			
1.02.1.02.02	RSUD Alimuddin Umar	27.259.414.200,00	(3,87)	26.203.440.214,00	(3,87)	11.387.850.600,00	48.878.396.194,00	60.266.246.794,00	10.677.126.105,00	51.257.333.200,00	61.934.493.305,00	1.668.212.511,00	2,77			
1.02.1.02.02.01	RSUD Alimuddin Umar	27.259.414.200,00	(3,87)	26.203.440.214,00	(3,87)	11.387.850.600,00	48.878.396.194,00	60.266.246.794,00	10.677.126.105,00	51.257.333.200,00	61.934.493.305,00	1.668.212.511,00	2,77			
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.040.000,00	0,00	113.040.000,00	0,00	4.864.962.700,00	141.934.371.697,11	146.799.334.397,11	4.864.709.889,00	68.389.128.475,00	73.253.838.394,00	(73.546.496.033,11)	(50,10)			
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.040.000,00	0,00	113.040.000,00	0,00	4.864.962.700,00	141.228.498.897,11	146.093.461.597,11	4.864.709.889,00	67.599.989.395,00	72.464.689.294,00	(73.628.762.313,11)	(50,40)			
1.03.1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.040.000,00	0,00	113.040.000,00	0,00	4.864.962.700,00	141.228.498.897,11	146.093.461.597,11	4.864.709.889,00	67.599.989.395,00	72.464.689.294,00	(73.628.762.313,11)	(50,40)			
1.03.4.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.872.800,00	705.872.800,00	0,00	789.139.080,00	789.139.080,00	83.266.280,00	11,80			
1.03.4.01.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.872.800,00	705.872.800,00	0,00	789.139.080,00	789.139.080,00	83.266.280,00	11,80			
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.524.000,00	5.455.524.000,00	0,00	5.346.016.000,00	5.346.016.000,00	(109.508.000,00)	(2,01)			
1.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.524.000,00	5.455.524.000,00	0,00	5.346.016.000,00	5.346.016.000,00	(109.508.000,00)	(2,01)			
1.04.1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.524.000,00	5.455.524.000,00	0,00	5.346.016.000,00	5.346.016.000,00	(109.508.000,00)	(2,01)			
1.05	Kecamatan, Kelurahan, Kecamatan dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.705.800,00	5.827.957.450,00	13.105.663.250,00	7.857.962.418,00	5.113.691.350,00	12.967.653.768,00	(138.099.482,00)	(1,05)			
1.05.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.705.800,00	5.827.957.450,00	13.105.663.250,00	7.857.962.418,00	5.113.691.350,00	12.967.653.768,00	(138.099.482,00)	(1,05)			
1.05.1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.705.800,00	5.827.957.450,00	13.105.663.250,00	7.857.962.418,00	5.113.691.350,00	12.967.653.768,00	(138.099.482,00)	(1,05)			
1.06	Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.155.800,00	5.479.131.050,00	7.704.286.850,00	2.318.842.900,00	4.017.186.150,00	6.336.029.050,00	(1.368.257.800,00)	(17,76)			
1.06.1.06.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.155.800,00	5.479.131.050,00	7.704.286.850,00	2.318.842.900,00	4.017.186.150,00	6.336.029.050,00	(1.368.257.800,00)	(17,76)			



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						BELANDA					
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1.06.1.06.01.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.155.800,00	5.479.131.050,00	7.704.286.850,00	2.318.842.200,00	4.017.186.150,00	6.316.029.050,00	(1.368.257.800,00)	(17,76)
2	Usunan Wajib Non Pelayanan Dasar	1.772.920.720,00	1.568.155.690,00	(204.765.040,00)	(11,55)	28.316.725.150,00	68.053.046.939,00	96.369.802.089,00	33.107.770.036,00	48.590.107.291,50	81.687.877.377,50	(14.681.924.761,50)	(15,23)
2.01	Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.172.600,00	1.183.172.600,00	0,00	955.048.300,00	955.048.300,00	(228.124.300,00)	(19,28)
2.01.2.12.01	Sifat Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.172.600,00	1.183.172.600,00	0,00	955.048.300,00	955.048.300,00	(228.124.300,00)	(19,28)
2.01.2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.172.600,00	1.183.172.600,00	0,00	955.048.300,00	955.048.300,00	(228.124.300,00)	(19,28)
2.02	Pembudayaan Perempuan dan Perlinggungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.109.642,00	1.616.109.642,00	0,00	990.291.109,00	990.291.109,00	(625.818.533,00)	(38,72)
2.02.2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembudayaan Perempuan dan Perlinggungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.109.642,00	1.616.109.642,00	0,00	990.291.109,00	990.291.109,00	(625.818.533,00)	(38,72)
2.02.2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembudayaan Perempuan dan Perlinggungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.109.642,00	1.616.109.642,00	0,00	990.291.109,00	990.291.109,00	(625.818.533,00)	(38,72)
2.03	Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.751.150,00	1.713.098.400,00	3.891.849.550,00	2.215.182.862,00	1.442.575.976,50	3.657.758.788,50	(234.090.761,50)	(6,01)
2.03.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.751.150,00	1.713.098.400,00	3.891.849.550,00	2.215.182.862,00	1.442.575.976,50	3.657.758.788,50	(234.090.761,50)	(6,01)
2.03.2.03.01.01	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.751.150,00	1.713.098.400,00	3.891.849.550,00	2.215.182.862,00	1.442.575.976,50	3.657.758.788,50	(234.090.761,50)	(6,01)
2.04	Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.818.000,00	2.724.818.000,00	0,00	809.650.000,00	809.650.000,00	(1.915.168.000,00)	(70,29)
2.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.818.000,00	2.724.818.000,00	0,00	809.650.000,00	809.650.000,00	(1.915.168.000,00)	(70,29)
2.04.1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.818.000,00	2.724.818.000,00	0,00	809.650.000,00	809.650.000,00	(1.915.168.000,00)	(70,29)
2.05	Lingkungan Hidup	92.090.000,00	93.675.000,00	1.585.000,00	1,72	2.659.725.100,00	10.964.799.966,00	13.624.525.066,00	2.662.237.809,00	9.420.147.117,00	12.082.385.026,00	(1.542.150.040,00)	(11,32)
2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	92.090.000,00	93.675.000,00	1.585.000,00	1,72	2.659.725.100,00	10.964.799.966,00	13.624.525.066,00	2.662.237.809,00	9.420.147.117,00	12.082.385.026,00	(1.542.150.040,00)	(11,32)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.837.800,00	3.519.540.280,00	6.285.378.080,00	3.512.191.489,00	3.051.971.060,00	6.564.162.549,00	(278.794.469,00)	4,44
2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.837.800,00	3.519.540.280,00	6.285.378.080,00	3.512.191.489,00	3.051.971.060,00	6.564.162.549,00	(278.794.469,00)	4,44
2.06.2.06.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.837.800,00	3.519.540.280,00	6.285.378.080,00	3.512.191.489,00	3.051.971.060,00	6.564.162.549,00	(278.794.469,00)	4,44
2.07	Pembudayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.420.400,00	3.959.834.700,00	6.373.255.100,00	2.630.989.816,00	2.512.081.500,00	5.143.071.316,00	(1.230.183.784,00)	(19,30)
2.07.2.07.01	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Peikon	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.420.400,00	3.959.834.700,00	6.373.255.100,00	2.630.989.816,00	2.512.081.500,00	5.143.071.316,00	(1.230.183.784,00)	(19,30)
2.07.2.07.01.01	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Peikon	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.420.400,00	3.959.834.700,00	6.373.255.100,00	2.630.989.816,00	2.512.081.500,00	5.143.071.316,00	(1.230.183.784,00)	(19,30)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.439.200,00	6.723.377.300,00	9.486.816.500,00	3.445.699.632,00	5.786.609.600,00	9.232.309.232,00	(254.507.268,00)	(2,68)
2.08.2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembudayaan Perempuan dan Perlinggungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.439.200,00	6.723.377.300,00	9.486.816.500,00	3.445.699.632,00	5.786.609.600,00	9.232.309.232,00	(254.507.268,00)	(2,68)
2.08.2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembudayaan Perempuan dan Perlinggungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.439.200,00	6.723.377.300,00	9.486.816.500,00	3.445.699.632,00	5.786.609.600,00	9.232.309.232,00	(254.507.268,00)	(2,68)
2.09	Perhubungan	301.560.000,00	165.471.000,00	(136.089.000,00)	(45,13)	2.269.348.300,00	4.734.664.900,00	7.004.012.790,00	4.177.545.504,00	1.615.644.246,00	5.793.189.750,00	(1.210.823.040,00)	(17,29)
2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan	301.560.000,00	165.471.000,00	(136.089.000,00)	(45,13)	2.269.348.300,00	4.734.664.900,00	7.004.012.790,00	4.177.545.504,00	1.615.644.246,00	5.793.189.750,00	(1.210.823.040,00)	(17,29)
2.09.2.09.01.01	Dinas Perhubungan	301.560.000,00	165.471.000,00	(136.089.000,00)	(45,13)	2.269.348.300,00	4.734.664.900,00	7.004.012.790,00	4.177.545.504,00	1.615.644.246,00	5.793.189.750,00	(1.210.823.040,00)	(17,29)



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						BELANJA					
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	TDK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TDK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
2.10	Komunikasi Dan Informatika	256.188.430,00	282.541.490,00	26.353.060,00	10,29	2.176.509.900,00	21.044.524.905,00	23.221.034.805,00	2.822.497.277,00	17.033.074.608,00	19.855.571.985,00	(3.365.462.820,00)	(14,49)
2.10	Dinas Komunikasi dan Informatika	256.188.430,00	282.541.490,00	26.353.060,00	10,29	2.176.509.900,00	7.053.723.875,00	9.230.233.775,00	2.822.497.277,00	6.267.529.408,00	9.090.026.785,00	(140.206.990,00)	(1,52)
2.10	Dinas Komunikasi dan Informatika	256.188.430,00	282.541.490,00	26.353.060,00	10,29	2.176.509.900,00	7.053.723.875,00	9.230.233.775,00	2.822.497.277,00	6.267.529.408,00	9.090.026.785,00	(140.206.990,00)	(1,52)
2.10	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990.801.030,00	13.990.801.030,00	0,00	10.765.545.200,00	10.765.545.200,00	(3.225.255.830,00)	(23,05)
2.10	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990.801.030,00	13.990.801.030,00	0,00	10.765.545.200,00	10.765.545.200,00	(3.225.255.830,00)	(23,05)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	891.283.800,00	888.283.800,00	(3.000.000,00)	(0,34)	3.012.587.000,00	1.392.406.000,00	4.404.993.000,00	3.104.261.632,00	901.372.469,00	4.005.634.101,00	(399.358.899,00)	(9,07)
2.11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	891.283.800,00	888.283.800,00	(3.000.000,00)	(0,34)	3.012.587.000,00	1.392.406.000,00	4.404.993.000,00	3.104.261.632,00	901.372.469,00	4.005.634.101,00	(399.358.899,00)	(9,07)
2.11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	891.283.800,00	888.283.800,00	(3.000.000,00)	(0,34)	3.012.587.000,00	1.392.406.000,00	4.404.993.000,00	3.104.261.632,00	901.372.469,00	4.005.634.101,00	(399.358.899,00)	(9,07)
2.12	Perencanaan Modal	78.700.000,00	79.000.000,00	300.000,00	0,38	2.438.413.700,00	2.012.112.606,00	4.450.526.306,00	2.521.183.793,00	447.559.106,00	2.968.742.899,00	(1.481.783.407,00)	(33,29)
2.12	Dinas Perencanaan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	78.700.000,00	79.000.000,00	300.000,00	0,38	2.438.413.700,00	2.012.112.606,00	4.450.526.306,00	2.521.183.793,00	447.559.106,00	2.968.742.899,00	(1.481.783.407,00)	(33,29)
2.12	Dinas Perencanaan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	78.700.000,00	79.000.000,00	300.000,00	0,38	2.438.413.700,00	2.012.112.606,00	4.450.526.306,00	2.521.183.793,00	447.559.106,00	2.968.742.899,00	(1.481.783.407,00)	(33,29)
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	153.098.500,00	59.184.400,00	(93.914.100,00)	(61,34)	3.741.183.300,00	2.776.587.800,00	6.517.771.100,00	4.014.982.274,00	1.468.248.900,00	5.483.201.174,00	(1.034.569.926,00)	(15,87)
2.13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	153.098.500,00	59.184.400,00	(93.914.100,00)	(61,34)	3.741.183.300,00	2.776.587.800,00	6.517.771.100,00	4.014.982.274,00	1.468.248.900,00	5.483.201.174,00	(1.034.569.926,00)	(15,87)
2.13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	153.098.500,00	59.184.400,00	(93.914.100,00)	(61,34)	3.741.183.300,00	2.776.587.800,00	6.517.771.100,00	4.014.982.274,00	1.468.248.900,00	5.483.201.174,00	(1.034.569.926,00)	(15,87)
2.15	Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.539.000,00	152.539.000,00	0,00	105.914.000,00	105.914.000,00	(46.625.000,00)	(30,57)
2.15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.539.000,00	152.539.000,00	0,00	105.914.000,00	105.914.000,00	(46.625.000,00)	(30,57)
2.15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.539.000,00	152.539.000,00	0,00	105.914.000,00	105.914.000,00	(46.625.000,00)	(30,57)
2.16	Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.366.900,00	1.456.366.900,00	0,00	1.029.560.500,00	1.029.560.500,00	(426.806.400,00)	(29,31)
2.16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.366.900,00	1.456.366.900,00	0,00	1.029.560.500,00	1.029.560.500,00	(426.806.400,00)	(29,31)
2.16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.366.900,00	1.456.366.900,00	0,00	1.029.560.500,00	1.029.560.500,00	(426.806.400,00)	(29,31)
2.17	Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.529.300,00	1.914.714.850,00	3.812.244.150,00	2.001.027.748,00	980.058.850,00	2.981.086.598,00	(831.157.552,00)	(21,80)
2.17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.529.300,00	1.914.714.850,00	3.812.244.150,00	2.001.027.748,00	980.058.850,00	2.981.086.598,00	(831.157.552,00)	(21,80)
2.17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.529.300,00	1.914.714.850,00	3.812.244.150,00	2.001.027.748,00	980.058.850,00	2.981.086.598,00	(831.157.552,00)	(21,80)
2.18	Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.379.500,00	164.379.500,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	(134.079.500,00)	(81,57)
2.18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.379.500,00	164.379.500,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	(134.079.500,00)	(81,57)
2.18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.379.500,00	164.379.500,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	(134.079.500,00)	(81,57)
3	Ususan Pilihan	82.482.000,00	82.482.000,00	0,00	0,00	12.254.065.100,00	28.554.533.499,00	40.808.618.596,00	11.575.364.211,00	20.299.200.395,00	31.874.573.666,00	(8.934.044.990,00)	(21,89)
3.01	Kedudukan dan Perikatan	76.227.000,00	76.227.000,00	0,00	0,00	2.516.573.100,00	4.376.724.431,00	6.893.291.531,00	2.474.852.201,00	3.230.349.503,00	5.705.201.704,00	(1.188.959.827,00)	(17,24)
3.01	Dinas Perikanan	76.227.000,00	76.227.000,00	0,00	0,00	2.516.573.100,00	4.376.724.431,00	6.893.291.531,00	2.474.852.201,00	3.230.349.503,00	5.705.201.704,00	(1.188.959.827,00)	(17,24)
3.01	Dinas Perikanan	76.227.000,00	76.227.000,00	0,00	0,00	2.516.573.100,00	4.376.724.431,00	6.893.291.531,00	2.474.852.201,00	3.230.349.503,00	5.705.201.704,00	(1.188.959.827,00)	(17,24)
3.02	Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.583.679,00	4.871.583.679,00	0,00	3.627.541.019,00	3.627.541.019,00	(1.244.042.660,00)	(25,54)



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		TIDAK LANGSUNG		SEBELUM PERUBAHAN LANGSUNG		SETELAH PERUBAHAN LANGSUNG		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14		
5.05.5.05.05	Kecamatan Batu Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	321.685.000,00	253.348.800,00	575.033.800,00	296.595.677,00	214.580.300,00	511.135.977,00	(63.907.822,00)	(11,11)		
5.05.5.05.05.01	Kecamatan Batu Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	321.685.000,00	253.348.800,00	575.033.800,00	296.595.677,00	214.580.300,00	511.135.977,00	(63.907.822,00)	(11,11)		
5.05.5.05.06	Kecamatan Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	504.091.000,00	2.093.376.319,25	2.597.467.319,25	513.618.000,00	2.093.002.950,00	2.556.613.950,00	(40.845.369,25)	(1,57)		
5.05.5.05.06.01	Kecamatan Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	504.091.000,00	2.093.376.319,25	2.597.467.319,25	513.618.000,00	2.093.002.950,00	2.556.613.950,00	(40.845.369,25)	(1,57)		
5.05.5.05.07	Kecamatan Sukau	0,00	0,00	0,00	0,00	364.105.000,00	260.939.000,00	625.044.000,00	318.301.833,00	221.689.000,00	539.990.833,00	(85.053.167,00)	(13,61)		
5.05.5.05.07.01	Kecamatan Sukau	0,00	0,00	0,00	0,00	364.105.000,00	260.939.000,00	625.044.000,00	318.301.833,00	221.689.000,00	539.990.833,00	(85.053.167,00)	(13,61)		
5.05.5.05.08	Kecamatan Suoh	0,00	0,00	0,00	0,00	306.131.000,00	235.602.800,00	541.733.800,00	262.282.500,00	195.333.800,00	457.616.300,00	(84.117.500,00)	(15,53)		
5.05.5.05.08.01	Kecamatan Suoh	0,00	0,00	0,00	0,00	306.131.000,00	235.602.800,00	541.733.800,00	262.282.500,00	195.333.800,00	457.616.300,00	(84.117.500,00)	(15,53)		
5.05.5.05.09	Kecamatan Gedung Surian	0,00	0,00	0,00	0,00	299.061.000,00	235.610.950,00	534.671.950,00	291.162.000,00	203.927.450,00	463.089.450,00	(71.582.500,00)	(13,39)		
5.05.5.05.09.01	Kecamatan Gedung Surian	0,00	0,00	0,00	0,00	299.061.000,00	235.610.950,00	534.671.950,00	291.162.000,00	203.927.450,00	463.089.450,00	(71.582.500,00)	(13,39)		
5.05.5.05.10	Kecamatan Kebun Tebu	0,00	0,00	0,00	0,00	284.921.000,00	262.945.000,00	547.866.000,00	254.694.000,00	224.038.500,00	476.722.500,00	(69.143.500,00)	(12,62)		
5.05.5.05.10.01	Kecamatan Kebun Tebu	0,00	0,00	0,00	0,00	284.921.000,00	262.945.000,00	547.866.000,00	254.694.000,00	224.038.500,00	476.722.500,00	(69.143.500,00)	(12,62)		
5.05.5.05.11	Kecamatan Air Hitam	0,00	0,00	0,00	0,00	296.233.000,00	242.427.000,00	538.660.000,00	312.428.000,00	200.510.000,00	512.938.000,00	(25.722.000,00)	(4,78)		
5.05.5.05.11.01	Kecamatan Air Hitam	0,00	0,00	0,00	0,00	296.233.000,00	242.427.000,00	538.660.000,00	312.428.000,00	200.510.000,00	512.938.000,00	(25.722.000,00)	(4,78)		
5.05.5.05.12	Kecamatan Pagar dewa	0,00	0,00	0,00	0,00	266.539.000,00	246.300.950,00	512.839.950,00	277.983.000,00	206.506.250,00	484.489.250,00	(28.350.700,00)	(5,53)		
5.05.5.05.12.01	Kecamatan Pagar dewa	0,00	0,00	0,00	0,00	266.539.000,00	246.300.950,00	512.839.950,00	277.983.000,00	206.506.250,00	484.489.250,00	(28.350.700,00)	(5,53)		
5.05.5.05.13	Kecamatan Batu Ketulis	0,00	0,00	0,00	0,00	301.889.000,00	263.639.750,00	565.528.750,00	267.992.500,00	217.205.600,00	485.198.100,00	(80.330.650,00)	(14,20)		
5.05.5.05.13.01	Kecamatan Batu Ketulis	0,00	0,00	0,00	0,00	301.889.000,00	263.639.750,00	565.528.750,00	267.992.500,00	217.205.600,00	485.198.100,00	(80.330.650,00)	(14,20)		
5.05.5.05.14	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	0,00	0,00	0,00	0,00	286.335.000,00	246.023.900,00	532.358.900,00	248.599.500,00	200.293.750,00	442.893.250,00	(89.515.650,00)	(16,81)		
5.05.5.05.14.01	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	0,00	0,00	0,00	0,00	286.335.000,00	246.023.900,00	532.358.900,00	248.599.500,00	200.293.750,00	442.893.250,00	(89.515.650,00)	(16,81)		
5.05.5.05.15	Kecamatan Lumbock Semihung	0,00	0,00	0,00	0,00	289.163.000,00	252.060.950,00	541.823.950,00	254.992.500,00	220.798.150,00	475.750.650,00	(66.073.300,00)	(12,19)		
5.05.5.05.15.01	Kecamatan Lumbock Semihung	0,00	0,00	0,00	0,00	289.163.000,00	252.060.950,00	541.823.950,00	254.992.500,00	220.798.150,00	475.750.650,00	(66.073.300,00)	(12,19)		
	JUMLAH	1.121.507.601.970,03	1.013.085.265.918,79	(108.422.335.551,24)	(9,67)	603.957.494.408,68	543.499.746.560,35	1.147.457.240.969,03	618.830.253.840,76	425.507.008.985,75	1.044.337.262.526,51	(103.119.978.142,57)	(8,99)		

PARAF KOORDINASI

BUPATI LAMPUNG BARAT

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Keppras	
6	LusRaktat	
7	B. Pembanguan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAKOSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01
 Organisasi : 1.01.01
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01
 Urusan Wajib Pelajaran Dasar Pendidikan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BETAWAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETelah PERUBAHAN	5	6		
1							
1.01.1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	55.750.000,00	53.650.000,00	(5.100.000,00)	(5,16)		
1.01.1.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.750.000,00	53.650.000,00	(5.100.000,00)	(5,16)		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	55.750.000,00	53.650.000,00	(5.100.000,00)	(5,16)		
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	289.822.850,100,00	288.113.856,374,00	(712.993,726,00)	(0,25)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	201.292.913,200,00	203.056.837,124,00	1.803.523.924,00	0,90		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	201.292.913,200,00	203.056.837,124,00	1.803.523.924,00	0,90		
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	87.533.936,900,00	85.017,019,250,00	(2.515.917.650,00)	(2,88)		
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	385.177.500,00	263.166.500,00	(1.121.111.000,00)	(30,38)		
1.01.1.01.01.01.01	Persediaan Jasa Swat Menywar	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.02	Persediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	20,00		
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	20,00		
1.01.1.01.01.01.03	Persediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	17.825.000,00	17.825.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.825.000,00	17.825.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.04	Persediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.250.000,00	1.280.000,00	30.000,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	1.280.000,00	30.000,00	0,00		
1.01.1.01.01.01.05	Persediaan Jasa Kesehatan Kantor	8.305.500,00	8.305.500,00	0,00	0,00		

OPD KABAG HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.05 Unsur Pendukung Kecamatan
 Organisasi : 5.05.15 Kecamatan Lumbok Semining
 Sub Unit Organisasi : 5.05.15.01 Kecamatan Lumbok Semining

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.05.5.05.15.00.00.5	BELANJA DAERAH	541.823.950,00	475.750.650,00	(66.073.300,00)	(12,19)	
5.05.5.05.15.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	289.163.000,00	254.952.500,00	(34.210.500,00)	(11,83)	
5.05.5.05.15.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	289.163.000,00	254.952.500,00	(34.210.500,00)	(11,83)	
5.05.5.05.15.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	252.660.950,00	220.798.150,00	(31.862.800,00)	(12,61)	
5.05.5.05.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	139.053.650,00	114.507.400,00	(24.546.250,00)	(17,65)	
5.05.5.05.15.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.03	<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.04	<i>Penyediaan jasa Administrasi keuangan</i>	317.500,00	317.500,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	317.500,00	317.500,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.05	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	12.221.000,00	12.221.000,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.021.000,00	8.021.000,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.06	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	15.141.500,00	15.141.500,00	0,00	0,00	
5.05.5.05.15.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.141.500,00	15.141.500,00	0,00	0,00	

OPD
KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		
5.05.5.05.15.01.07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.912.400,00	17.912.400,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.912.400,00	17.912.400,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.08	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.194.000,00	3.194.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.194.000,00	3.194.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.10	Penyediaan makanan dan minuman	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10.690.000,00	0,00	(10.690.000,00)	(100,00)			
5.05.5.05.15.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.690.000,00	0,00	(10.690.000,00)	(100,00)			
5.05.5.05.15.01.12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.13	Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	9.856.250,00	0,00	(9.856.250,00)	(100,00)			
5.05.5.05.15.01.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.856.250,00	0,00	(9.856.250,00)	(100,00)			
5.05.5.05.15.01.14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	17.401.000,00	13.401.000,00	(4.000.000,00)	(22,99)			
5.05.5.05.15.01.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.401.000,00	13.401.000,00	(4.000.000,00)	(22,99)			
5.05.5.05.15.01.15	Penyediaan Jasa Sewa Perengkapan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52.457.300,00	47.140.750,00	(5.316.550,00)	(10,14)			
5.05.5.05.15.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.008.700,00	13.008.700,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.02.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.008.700,00	13.008.700,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.02.05	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31.715.000,00	31.715.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.02.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.715.000,00	31.715.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.02.06	Pemeliharaan rutin/berkala perengkapan gedung kantor	7.733.600,00	2.417.050,00	(5.316.550,00)	(68,75)			
5.05.5.05.15.02.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.733.600,00	2.417.050,00	(5.316.550,00)	(68,75)			
5.05.5.05.15.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)			
5.05.5.05.15.03.01	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
5.05.5.05.15.03.01.5.2.2	BELANDA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)			
5.05.5.05.15.04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	56.150.000,00	56.150.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.01.5.2.2	BELANDA BARANG DAN JASA	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.02	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.02.5.2.2	BELANDA BARANG DAN JASA	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.03	<i>Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.03.5.2.2	BELANDA BARANG DAN JASA	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.04	<i>Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	2.549.000,00	2.549.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.04.5.2.2	BELANDA BARANG DAN JASA	2.549.000,00	2.549.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.05	<i>Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.05.5.2.1	BELANDA PEGAWAI	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00			
5.05.5.05.15.04.05.5.2.2	BELANDA BARANG DAN JASA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(541.823.950,00)	(475.750.650,00)	66.073.300,00	(12,19)			

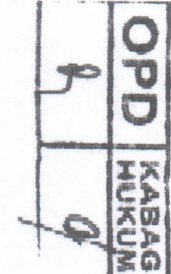
PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	PARAF	
1	SETDAKAB		
2	ASSISTEN 1		
3	ASSISTEN 2		
4	BPKD		
5	Keppan		
6	Inspektori		
7	Ke. Pembinaan		
8			
9			
10	KABAG HUKUM		

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

**PENERUNTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANDA, MENURUT URUSAN PENERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERUBAH / (BERUBAH)		%
		PEGAJIAN	BAYANG B. JASA	MOMAL	JUMLAH	PERANAT	BAYANG B. JASA	MOMAL	JUMLAH	(Rp)	%			
												10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	42.215,34.550,00	1.320.035.960,00	139.793.444.579,96	200.002.119.644,10	55.581.513.865,30	123.967.410,00,35	219.967.308.504,03	257.500.038.677,15	(77.483.095.299,83)	(5,33)			
1.02	Perencanaan	1.229.21.300,00	19.403.370,00,00	43.465.14.800,00	66.672.590,00,00	15.073.463.000,00	26.697.672,00,00	42.975.240.150,38	46.807.453.791,00	(2.807.112.290,00)	(4,24)			
1.02.101.01.01	Program/Proyek/kegiatan/kegiatan	2.900.390,00	597.572.500,00	0,00	365.275,00,00	4.200.000,00	287.058.500,00	0,00	288.155.000,00	(17.020.000,00)	(5,93)			
1.02.101.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	8.338.500,00	0,00	8.338.500,00	0,00	8.338.500,00	0,00	8.338.500,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	53.224.000,00	0,00	53.224.000,00	0,00	53.224.000,00	0,00	53.224.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	62.574.000,00	0,00	62.574.000,00	0,00	62.574.000,00	0,00	62.574.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	23.218.000,00	0,00	23.218.000,00	0,00	23.218.000,00	0,00	23.218.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	64.578.000,00	0,00	64.578.000,00	0,00	64.578.000,00	0,00	64.578.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	1.430.000,00	47.152.000,00	0,00	50.582.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	74.526.000,00	0,00	74.526.000,00	0,00	74.526.000,00	0,00	74.526.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	2.850.000,00	367.018.000,00	55.425.000,00	426.323.000,00	2.487.000,00	357.630.000,00	48.320.000,00	415.577.000,00	(7.250.000,00)	(1,75)			
1.02.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	0,00	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	21.120.000,00	0,00	21.120.000,00	0,00	0,00			
1.02.101.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	2.850.000,00	367.018.000,00	55.425.000,00	426.323.000,00	2.487.000,00	357.630.000,00	48.320.000,00	415.577.000,00	(7.250.000,00)	(1,75)			
1.02.101.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.101.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.101.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.101.01	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



C:\APPALITV\...
 PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENERINTAHAN DAERAH BELANDA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN UPUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANDA	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANDA	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	(Rp)	%
1													
5.05 - 5.05.15 - 04 - 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah										10 = 7 + 8 + 9		
5.05 - 5.05.15 - 04 - 05			0,00	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00	0,00	0,00
		49.800.000,00	200.000,00	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	63.024.388.154,00	268.954.472.332,20	211.520.886.074,15	543.499.746.550,35	71.117.822.145,30	274.970.032.800,85	235.319.730.573,00	425.507.008.985,75	(117.992.737.574,60)	(21,71)		

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	PARAF	
1	SETDAKAB	<i>[Signature]</i>	
2	ASISTEN I	<i>[Signature]</i>	
3	ASISTEN II	<i>[Signature]</i>	
4	BPKD	<i>[Signature]</i>	
5	Kap Rega	<i>[Signature]</i>	
6	Inspektoral	<i>[Signature]</i>	
7	K. Pembayungan	<i>[Signature]</i>	
8			
9			
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	

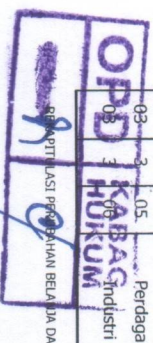
BUPATI LAMPUNG BARAT
[Signature]
MAROSIL MARSUS



**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PELAYANAN UMUM				
01	Komunikasi Dan Informatika	398.935.871.241,93	390.300.268.795,76	(8.635.602.446,17)	(2,16)
01	Perencanaan	23.221.034.805,00	19.855.571.985,00	(3.365.462.820,00)	(14,49)
01	Keuangan	8.102.201.550,00	6.165.706.023,00	(1.936.495.527,00)	(23,90)
01	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	236.589.153.759,68	251.712.134.380,76	15.122.980.621,08	6,39
01	Penelitian dan Pengembangan	6.797.827.068,00	4.752.940.155,00	(2.044.886.913,00)	(30,08)
01	Penanggulangan Bencana Daerah	3.257.258.400,00	2.707.349.422,00	(549.908.978,00)	(16,88)
01	Sekretariat DPRD	5.207.104.900,00	4.212.471.009,00	(994.633.891,00)	(19,10)
01	Sekretariat Daerah	39.898.341.970,00	35.993.741.749,00	(3.904.600.221,00)	(9,79)
01	Sekretariat DPRD	55.726.117.800,00	45.070.627.822,00	(10.655.489.978,00)	(19,12)
01	Inspektorat	6.777.270.050,00	7.268.826.413,00	491.556.363,00	7,25
01	Kecamatan	13.359.560.939,25	12.560.899.837,00	(798.661.102,25)	(5,98)
02	KETERTIBAN DAN KETERTRAMAN				
02	Ketertraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.044.313.549,00	14.415.391.934,00	(628.921.615,00)	(4,18)
02	Persandian	13.105.663.250,00	12.967.653.768,00	(138.009.482,00)	(1,05)
02	Kantor Kesbang dan Politik	152.539.000,00	105.914.000,00	(46.625.000,00)	(30,57)
02		1.786.111.299,00	1.341.824.166,00	(444.287.133,00)	(24,87)
03	EKONOMI				
03	Tenaga Kerja	61.481.130.783,00	49.296.767.891,50	(12.184.362.891,50)	(19,82)
03	Pangan	1.183.172.600,00	955.048.300,00	(228.124.300,00)	(19,28)
03	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.891.849.550,00	3.657.758.788,50	(234.090.761,50)	(6,01)
03	Perhubungan	6.373.255.100,00	5.143.071.316,00	(1.230.183.784,00)	(19,30)
03	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.004.012.790,00	5.793.189.750,00	(1.210.823.040,00)	(17,29)
03	Penanaman Modal	4.404.993.000,00	4.005.634.101,00	(399.358.899,00)	(9,07)
03	Kelautan dan Perikanan	4.450.526.306,00	2.968.742.899,00	(1.481.783.407,00)	(33,29)
03	Pertanian	6.893.297.531,00	5.705.201.704,00	(1.188.095.827,00)	(17,24)
03	Perdagangan	21.789.294.706,00	16.194.144.804,00	(5.595.149.902,00)	(25,68)
03		2.872.509.000,00	3.317.152.029,00	444.643.029,00	15,48
03		2.618.220.200,00	1.556.824.200,00	(1.061.396.000,00)	(40,54)



REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1		3	4	5 = 4 - 3	6
04	LINGKUNGAN HIDUP	15.388.248.546,00	13.556.094.876,00	(1.832.153.670,00)	(11,91)
04	Lingkungan Hidup	13.624.535.066,00	12.082.385.026,00	(1.542.150.040,00)	(11,32)
04	Kelutanan	1.763.713.480,00	1.473.709.850,00	(290.003.630,00)	(16,44)
05	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	154.979.676.397,11	79.409.504.364,00	(75.570.172.033,11)	(48,76)
05	1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.799.334.397,11	73.253.838.364,00	(73.545.496.033,11)	(50,10)
05	1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.455.524.000,00	5.346.016.000,00	(109.508.000,00)	(2,01)
05	2 04 Penataan	2.724.818.000,00	809.650.000,00	(1.915.168.000,00)	(70,29)
06	KESEHATAN	181.829.397.350,99	183.232.767.092,25	1.403.369.741,26	0,77
06	1 02 Kesehatan	172.342.580.850,99	174.000.457.860,25	1.657.877.009,26	0,96
06	2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.486.816.500,00	9.232.309.232,00	(254.507.268,00)	(2,68)
07	PARIWISATA DAN BUDAYA	12.845.721.679,00	10.140.302.693,00	(2.705.418.986,00)	(21,06)
07	2 13 Kepemudaan dan Olahraga	6.517.771.100,00	5.483.201.174,00	(1.034.569.926,00)	(15,87)
07	2 16 Kebudayaan	1.456.366.900,00	1.029.560.500,00	(426.806.400,00)	(29,31)
07	3 02 Pariwisata	4.871.583.679,00	3.627.541.019,00	(1.244.042.660,00)	(25,54)
08	PENDIDIKAN	291.347.106.850,00	290.095.682.472,00	(1.251.424.378,00)	(0,43)
08	1 01 Pendidikan	287.370.483.200,00	287.084.295.874,00	(286.187.326,00)	(0,10)
08	2 17 Perpustakaan	3.812.244.150,00	2.981.086.598,00	(831.157.552,00)	(21,80)
08	2 18 Kearsipan	164.379.500,00	30.300.000,00	(134.079.500,00)	(81,57)
09	PERLINDUNGAN SOSIAL	15.605.774.572,00	13.890.482.708,00	(1.715.291.864,00)	(10,99)
09	1 06 Sosial	7.704.286.850,00	6.336.029.050,00	(1.368.257.800,00)	(17,76)
09	2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.616.109.642,00	990.291.109,00	(625.818.533,00)	(38,72)
09	2 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.285.378.080,00	6.564.162.549,00	278.784.469,00	4,44
		1.147.452.240.969,03	1.044.337.262.826,51	(103.119.978.142,52)	(8,99)

PARAF KOORDINASI

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BPKO	
5	Bappeka	
6	Indeflotak	
7	Kesatuan	
8		
9		
0		

KABAG HUKUM

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 PER GOLONGAN DAN PERJABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON					JUMLAH	
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL				STAF STRUKTURAL		
						Inspektorat	kesehatan	pendidikan	pertanian			
Golongan IV/e												-
Golongan IV/d		1										1
Golongan IV/c		22							7		7	36
Golongan IV/b		2	55	-		1	2	345	1	1		407
Golongan IV/a		1	78	21		4	10	416	7	10		547
JUMLAH GOLONGAN IV	-	26	133	21	-	5	12	768	8	18		991
Golongan III/d			27	197		5	91	323	4	22		669
Golongan III/c			3	231		3	59	274	5	48		623
Golongan III/b				84		2	110	221	2	187		606
Golongan III/a				3			48	176	2	270		499
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	30	515	-	10	308	994	13	527		2.397
Golongan II/d							32	37	-	49		118
Golongan II/c							96	21	-	128		245
Golongan II/b						1	3	34	1	75		114
Golongan II/a						1		19	-	31		51
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	2	131	111	1	283		528
Golongan I/d										1		1
Golongan I/c										6		6
Golongan I/b										8		8
Golongan I/a										-		-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		15
TOTAL	-	26	163	536	-	17	451	1.873	22	843		3.931

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeja	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG. HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tahun Penyeretaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyeretaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyeretaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyeretaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyeretaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyeretaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jml modal (investasi) yg akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan s.d. tahun ini
1	2020	PT. Bank Lampung	Perda propinsi Dati I Lampung No. 15 Th. 1992 Tg. 10/12/1992 Tentang Bank Pembangunan Lampung	Penyeretaan Modal	1.000.000.000	10.207.728.061	4.000.000.000	14.207.728.061	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH					1.000.000.000,00	10.207.728.061,43	4.000.000.000,00	14.207.728.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	BPKD	
5	Kapolda	
6	Inspektoral	
7	K. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2019		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
			APBD TA 2019	Perubahan APBD TA 2019		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							
JUMLAH							

N I H I L

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Kepptm	
6	Inspektur	
7	B. Pembangunan	
8		
9		

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

*) coret yang tidak perlu

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								pokok Pinjaman Daerah	Bunga	pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N I L A I											
*) coret yang tidak perlu											

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	P. PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BPKD	
5	Kepersta	
6	INSPEKTORAT	
7	Kepersta	
8	Kepersta	
9	Kepersta	
10	Kepersta	

BUPATI LAMPUNG BARAT,
 PAROSIL MABSUS